

IMPLEMENTASI PROGRAM *OPEN DEFECATION FREE* DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR (STUDI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO)

Adjeng Vierlyana Puteri, Radjikan, Supri Hartono
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2024

Revised Juni 2024

Accepted Juni 2024

Available online Juni 2024

adjengvp@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstrak

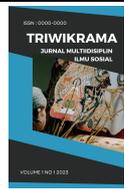
Salah satu masalah kesehatan di Indonesia adalah masalah stunting pada anak, adapun salah satu faktor penyebab stunting adalah lingkungan yang buruk dan sanitasi air yang tidak baik. Sehingga, pemerintah bersinergi dalam upaya membuat kebijakan dan implementasi program *Open Defecation Free* yaitu upaya untuk bebas dari buang air besar sembarangan dengan bantuan pembangunan jamban kepada masyarakat yang belum memilikinya. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Dinas Kesehatan menargetkan Kabupaten Sidoarjo deklarasi ODF. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui implementasi program *Open Defecation Free* di Kabupaten Sidoarjo beserta faktor pendukung dan penghambatnya Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian adalah

bahwasanya implementasi program *Open Defecation Free* di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai keberhasilan yang didukung oleh teori implementasi program yaitu *organization*, *interpretation*, dan *application*. Indikator *organization* mencapai keberhasilan karena dalam implementasi program ODF terdapat struktur organisasi, sumber daya, dan metode yang baik, indikator *interpretation* mencapai keberhasilan karena pihak-pihak yang terlibat memiliki pemahaman dan komunikasi yang baik, indikator *application* juga mencapai keberhasilan karena bantuan pembangunan jamban telah berhasil karena penguatan anggaran yang diperoleh dari lintas sektor seperti perusahaan swasta, organisasi, dan perorangan.

Kata Kunci: *Stunting, Implementasi Program, Open Defecation Free*

Abstract

One of the health problems in Indonesia is the problem of stunting in children. One of the factors causing stunting is a poor environment and poor water sanitation. Thus, the government synergizes in efforts to create policies and implement the Open Defecation Free program, namely an effort to be free from open defecation with the help of building latrines for people who do not have them. In 2024, the Sidoarjo Regency Government together with the Health Service are targeting Sidoarjo Regency to declare ODF. The aim of the research is to determine the implementation of the Open Defecation Free program in Sidoarjo Regency along with its supporting and inhibiting factors. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The results of the research are that the



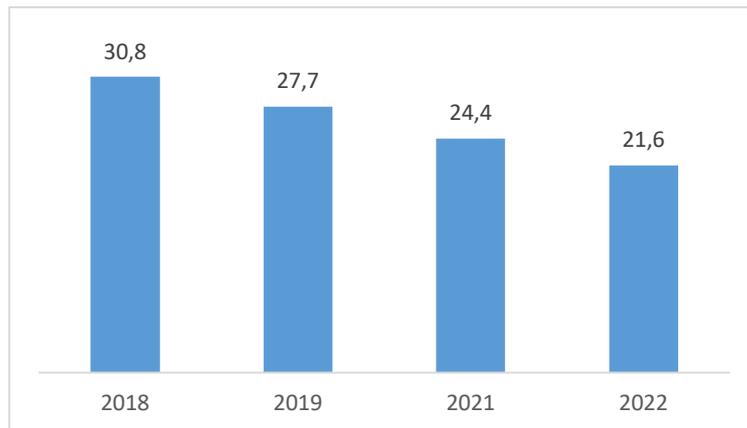
implementation of the Open Defecation Free program in Sidoarjo Regency has achieved success which is supported by the program implementation theory, namely organization, interpretation, and application. The organizational indicators achieved success because in the implementation of the ODF program there was a good organizational structure, resources and methods, the interpretation indicators achieved success because the parties involved had good understanding and communication, the application indicators also achieved success because the latrine construction assistance was successful because strengthening budgets obtained from cross-sectors such as private companies, organizations and individuals.

Keywords: *Stunting, Program Implementation, Open Defecation Free*

PENDAHULUAN

Bentuk permasalahan publik di Indonesia hingga saat ini sangat mudah kita temukan dan rasakan di berbagai sektor, sehingga hal tersebut sebagai salah satu bentuk tantangan dan dorongan bagi pemerintah Indonesia dengan mengedepankan pembuatan kebijakan publik (Mawaza & Khalil, 2020). Salah satu sektor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah sektor kesehatan, karena untuk mewujudkan pembangunan nasional yang menghasilkan kualitas kesehatan sumber daya manusia dan mempengaruhi ekonomi maupun lingkungan sosial (Balitbangkes Kemenkes RI, 2014). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia bersinergi dalam pembuatan kebijakan kesehatan hingga mengimplementasikan dalam bentuk berbagai program (Massie, 2009). Permasalahan kesehatan di Indonesia hingga tahun 2024 masih cukup menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dan tenaga kesehatan, contohnya masalah kesehatan yang belum terselesaikan secara tuntas adalah masalah stunting, masalah kesehatan yang menyerang anak-anak kecil yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan yang tidak mencapai standar tinggi badan yang telah ditetapkan sesuai usia. Kondisi stunting pada anak dapat terjadi pertumbuhan yang terhambat dan gangguan kesehatan, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan ketidaksesuaian konsumsi makanan sesuai usia (Rahmadhita, 2020).

Menurut Kementerian Kesehatan, bahwasanya angka stunting di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 21,6% yang dimana terjadi penurunan, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 24,4%. Meninjau hasil penurunan stunting tersebut, Pemerintah Indonesia bersinergi dan menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024.



Gambar Prevalensi Angka Stunting di Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: databoks (2023)

Angka stunting secara nasional dilatarbelakangi oleh hasil dari besaran kasus stunting di setiap daerah atau provinsi. Menurut Kementerian Kesehatan, Provinsi di Indonesia yang berhasil mengalami penurunan angka stunting hingga tahun 2022 adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara. Diantara lima provinsi tersebut, Provinsi Jawa timur yang memiliki angka stunting paling rendah dan berada dibawah persentase angka stunting nasional, sebesar 19,2% (Ali, 2023).

Pengoptimalan program-program untuk penurunan angka stunting sebagai salah satu cara meningkatkan kesehatan para anak-anak, Gubernur Khofiah mengatakan bahwa kerjasama antara beberapa *stakeholder* yang terlibat seperti pemerintah daerah, aktor swasta, lembaga-lembaga bidang kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat sebagai kekuatan yang sangat besar dalam upaya penurunan angka stunting di Jawa Timur (Bakorwil, 2023). Akan tetapi, salah satu kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Sidoarjo justru mengalami kenaikan pada angka stunting, pada Tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Sidoarjo turun jauh dari tahun sebelumnya, yang dimana hal tersebut dapat dikatakan penurunan yang signifikan. Namun, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sebesar 1,3%, (Rifai, 2023).

Beberapa faktor yang melatarbelakangi penyakit stunting pada anak ini berbagai macam bentuk, masalah gizi yang buruk sebagai faktor terkuat yang menyebabkan stunting pada anak. Namun, faktor yang berasal dari lingkungan juga sebagai penyebab stunting yang ditandai dengan lingkungan yang tidak bersih dan mudah mencemari, salah satu pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan balita adalah sanitasi air yang buruk, karena hal ini dapat menyebabkan balita dengan mudah terserang penyakit diare yang dapat menyerang pada kondisi gizi untuk pertumbuhan anak (Rahmuniyati & Sahayati, 2021).

Sanitasi air yang buruk disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tindakan Buang Air Besar (BAB) sembarangan, kualitas air minum yang buruk, kurangnya pengetahuan mengenai cuci tangan, penanganan sampah rumah tangga dan limbah cair rumah tangga yang buruk (Maryani & Mandagi, 2023). Oleh karena itu, pada Tahun 2023 pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo bersinergi untuk memperkuat dalam percepatan penanganan stunting melalui program *Open Defecation Free*



(ODF). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan bebas ODF sebesar 100%, (Rifai, 2023). Untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo ODF 100%, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama stakeholder lainnya yang terlibat melaksanakan pembangunan berupa jamban sehat untuk masyarakat yang belum memiliki jamban secara mandiri. Pada awal Tahun 2023, masih ada 6.696 KK yang belum memiliki jamban, penguatan program ODF menghasilkan penurunan pada akhir Tahun 2023 menjadi 5.548 KK yang belum memiliki jamban (Aprianto, 2023). Artinya, program ODF pada Tahun 2023 berhasil menyelesaikan pembangunan jamban sebanyak 1.148 KK. Untuk mewujudkan verifikasi Kabupaten Kota Sehat (KKS), Kabupaten Sidoarjo harus berhasil memverifikasi ODF di tingkat Kecamatan dan verifikasi desa yang telah ODF.

Dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program *Open Defecation Free* dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan landasan teori yaitu implementasi program oleh Charles O. Jones yang meliputi indikator *organization* (organisasi), *interpretation* (interpretasi), dan *application* (aplikasi).

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan masalah secara sistematis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono No. 46, Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang kesehatan. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo bertempat di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 46, Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan berada di sebelah barat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Pucang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supaat selaku Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo bahwasanya implementasi program ODF untuk penanganan stunting adalah sebagai berikut: *“Adanya implementasi program ODF ini berupaya untuk memberdayakan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan lingkungan. Partisipasi yang antusias oleh pihak-pihak yang terlibat menjadikan pemicu keberhasilan program ODF yang ditandai dengan sudah tidak adanya masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan karena adanya bantuan pembangunan jamban berupa septic tank dan kloset kepada masyarakat.”*

Dalam penelitian ini, terdapat dua pembahasan yang sesuai dengan penyajian data, yang pertama adalah pembahasan mengenai implementasi program ODF sesuai dengan fokus penelitian, dan yang kedua adalah faktor pendorong dan penghambat implementasi program ODF. Data yang diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi

dihubungkan dengan fokus penelitian yang menggunakan teori oleh Charles O. Jones meliputi *organization* (organisasi), *interpretation* (interpretasi), dan *application* (aplikasi).

A. Implementasi Program Menurut Charles O. Jones dalam Implementasi Program ODF Organization (Organisasi)

Menurut Charles O. Jones (1996) bahwasanya dalam implementasi kebijakan atau program memiliki tiga aktivitas penting untuk mengetahui keberhasilan atau bahkan kegagalan suatu kebijakan atau program. Tiga indikator aktivitas tersebut adalah meliputi: *Organization* (Organisasi), *Interpretation* (Interpretasi), dan *Application* (Aplikasi). Yang pertama aktivitas *organization* meliputi struktur organisasi, sumber daya, dan metode. Yang kedua aktivitas *interpretation* meliputi pemahaman atau usaha para pihak yang terlibat untuk mengerti maksud dan tujuan diimplementasikannya suatu kebijakan atau program. Yang ketiga aktivitas *application* meliputi penerapan secara rutin segala kegiatan untuk tercapainya suatu tujuan implementasi kebijakan atau program.

1) *Organization* (Organisasi)

a. Struktur organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supaat selaku Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, bahwasanya: “*Dalam program Open Defecation Free terdapat kegiatan deklrasi ODF yang terdapat struktur organisasi yaitu dalam lingkup internal Dinas Kesehatan sendiri dibebankan atau tupoksi program dari Seksi Kesehatan Lingkungan, kalau lingkup eksternalnya Dinas Kesehatan masuk didalam kelompok kerja atau Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan), kami masuk di struktur AMPL yang juga terdiri dari delapan OPD dengan tugasnya masing-masing.*”

Struktur organisasi dalam implementasi program ODF ini dapat dikatakan cukup berhasil karena OPD yang terlibat disusun secara terperinci dan dengan dibuktikannya keberhasilan Kabupaten Sidoarjo mencapai deklrasi ODF, yang dimana dibelakang itu kerja sama antar OPD bergerak dengan baik dari awal mula implementasi program ODF hingga mencapai target keberhasilan di tahun 2024 ini.

b. Sumber daya

Dalam implementasi program *Open Defecation Free* di Kabupaten Sidoarjo, terdapat sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia yang berupa sumber daya finansial atau anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supaat selaku Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, bahwasanya: “*Untuk sumber daya manusianya yang terlibat dalam implementasi program ini adalah terdiri dari Pemkab, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP3AKB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Puskesmas tingkat kecamatan, dan bantuan anggaran serta pembangunan jamban*

secraa fisik oleh perusahaan-perusahaan swasta, organisasi, dan perorangan, tentunya masyarakat tidak mengeluarkan biaya apapun.”

Sumber daya manusia yang terlibat sudah cukup baik bergerak komitmen terhadap tugas dan kewajibannya masing-masing. Selain itu, keterikatan dalam kerja sama secara formal mendorong masing-masing OPD mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

c. Metode

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supaat selaku Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, bahwasanya: *“kalau metode kita bergerak keseluruhan sama lintas sektor, menuju Kabupaten Sidoarjo deklrasi ODF yang pertama terdapat Surat Edaran Bupati, lalu verifikasi internal, lalu koordinasi lintas sektor, lalu koordinasi tim CSR, lalu update data baru, yang terakhir komitmen dalam pembangunan jamban.”*

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan sudah sesuai sebagai salah satu aktivitas dalam implementasi program ODF, karena disebut sebagai suatu jalan atau cara menuju tujuan yang telah ditetapkan, tujuan tersebut berupa percepatan ODF di Kabupaten Sidoarjo dengan kegiatan deklarasi ODF. Pencapaian tersebut diatur sesuai metode atau alur agar dapat bergerak secara terperinci dan teratur.

2) Interpretation (Interpretasi)

Maksud dari *interpretation* merupakan suatu pemahaman antar pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program Open Defecation Free di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supaat selaku Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, bahwasanya: *“Untuk pemahaman pihak-pihak yang terlibat ini dilatar belakangi oleh dasar hukum yang digunakan, dan komunikasi yang kuat, kita biasanya melakukan komunikasi melalui rapat dengan pihak puskesmas melalui zoom (online) setiap hari jumat dan dua minggu sekali untuk update data, lalu setiap dua minggu sekali juga ada rapat yang dipimpin oleh pemerintahan dari sekda dan diikuti oleh antar OPD serta camat dan kepala desa se-Sidoarjo.”*



Gambar Dasar Hukum Implementasi Program ODF di Kabupaten Sidoarjo
 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, diolah penulis (2024)

Dalam penelitian ini, beberapa pihak ODP yang terlibat dalam implementasi program ODF mempunyai pemahaman yang tinggi dan jelas, karena berpedoman pada dasar hukum yang mengikat dan tidak bisa dibantah. Selain itu, untuk menunjang pemahaman antar pihak OPD yang terlibat, dilakukan sebuah komunikasi yang berbentuk agenda rapat dan koordinasi yang seringkali dilaksanakan di waktu yang telah ditentukan, hal ini bertujuan untuk mendorong kesiapan yang kuat dalam implementasi program ODF. Tingkat pemahaman beberapa pihak yang terlibat ditandai dengan keberhasilan kegiatan deklarasi ODF Kabupaten Sidoarjo dan pemahaman masyarakat sebagai sasaran terkait adanya program ODF ini dalam bentuk bantuan pembangunan jamban dan manfaatnya yang diterima.

3) *Application* (Aplikasi)

Maksud dari *application* merupakan suatu bentuk penerapan dari program *Open Defecation Free*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supaat selaku Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, bahwasanya: *“Program ini sudah terimplementasi sudah lama dari Tahun 2006, dan sudah terlaksana deklarasi ODF di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 30 Mei 2024, bahwasanya Kabupaten Sidoarjo sudah bebas dari buang air besar sembarangan dan hasil di lapangan sudah nol. Untuk pengaplikasiannya di masyarakat awalnya dilakukan sebuah pemicuan atau dorongan kesadaran diri untuk membangun jamban secara mandiri, namun masyarakat banyak yang mengabaikan itu, sehingga selanjutnya diadakannya bantuan pembangunan jamban secara gratis yang didorong dengan bantuan anggaran dan pembangunan jamban secara fisik oleh lintas sektor yaitu perusahaan-perusahaan swasta, organisasi, dan perorangan. Dan untuk penerapan program ini dihubungkan dengan stunting sebenarnya itu tidak bisa disimpulkan secara langsung bahwasanya apabila program ODF ini sudah berhasil dan angka stunting juga pasti turun, itu tidak bisa disimpulkan seperti itu, karena tidak ada variabel langsung antara independen dengan independen, disini butuh variabel-variabel antara. Tapi kalau pengaruh sudah pasti ODF ini berpengaruh pada penanganan stunting, kalau pengaruhnya positif kan manfaatnya juga positif, alhamdulillah juga tahun ini angka stunting Kabupaten Sidoarjo menurun.”*

Dalam penelitian ini, program ODF di Kabupaten Sidoarjo secara nyata telah terimplementasi, kegiatan yang dilaksanakan dalam penerapan program ODF ini adalah pada mulanya yaitu kegiatan pemicuan atau mendorong kesadaran diri masyarakat untuk melakukan pembangunan jamban sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 Tentang STBM. Namun, kegiatan pemicuan tersebut dirasa tidak efektif dikarenakan pola tindakan masyarakat banyak yang tidak menghiraukan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo bersama OPD lain yang terlibat bersinergi mengimplementasikan program ODF dalam bentuk bantuan pembangunan jamban dengan mengedepankan alokasi anggaran yang berasal dari luar OPD yaitu perusahaan-perusahaan swasta, organisasi, dan perorangan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program ODF di Sidoarjo

1) Faktor pendukung

Dalam implementasi program ODF di Kabupaten terdapat faktor pendukung yang mengikat agar mencapai tujuan, faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dorongan upaya percepatan 0% perilaku buang air besar sembarangan Jawa Timur Tahun 2024 sesuai dengan SE Gubernur Jawa Timur Nomor 658/34834/023.3/2021 tanggal 30 Desember 2021
- b. Dorongan upaya percepatan Sidoarjo ODF atau stop buang air besar sembarangan Tahun 2024 sesuai SE Bupati Sidoarjo Nomor 400.7.11/2521/438.5.2/2024
- c. Dorongan upaya percepatan penurunan stunting sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021
- d. Kewajiban untuk deklarasi ODF Kabupaten Sidoarjo sesuai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024
- e. Dukungan berbagai pihak yang terlibat, antusias dari pengambil kebijakan, dan kepala daerah yang senantiasa memberikan tanggung jawab dan motivasi, serta keterlibatan OPD dan pihak lintas sektor yang senantiasa berkomitmen untuk bekerja sama.

2) Faktor penghambat

Selain faktor pendukung dalam implementasi program ODF, terdapat juga faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya kontribusi masyarakat untuk membangun jamban secara mandiri
- b. Perilaku masyarakat yang tinggal didekat sungai senantiasa buruk dan menormalisasikan tindakan buang air besar sembarangan di sungai
- c. Kurangnya anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo untuk pembangunan jamban, sehingga bekerja keras mendapatkan biaya dari pihak-pihak luar OPD

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti tentang Implementasi Program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Sidoarjo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Organization (Organisasi)

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi implementasi program ODF di Kabupaten Sidoarjo sudah berhasil dan terperinci dengan adanya struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang tergabung pada Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Dinas Kesehatan tergabung didalamnya, dan struktur internal yang



berkontribusi berasal dari bidang Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Lingkungan

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program ODF di Kabupaten Sidoarjo sudah bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, sistem koordinasi antar OPD yang sangat kuat terhadap komitmen keberhasilan implementasi program ODF.

c. Metode

Metode yang digunakan untuk mencapai keberhasilan implementasi program ODF di Kabupaten Sidoarjo sudah dilaksanakan secara tertaur, Dimulai dari adanya Surat Edaran Bupati, koordinasi antar OPD dan lintas sektor, update data, hingga komitmen dalam pembangunan jamban.

2) Interpretation (Interpretasi)

Interpretasi atau pemahaman antar pihak yang terlibat dalam implementasi program ODF di Kabupaten Sidoarjo sudah baik dan berhasil, karena pemahamannya sudah terikat dan berpedoman pada dasar hukum yang sah. Selain itu juga terdapat sistem komunikasi antar OPD dan lintas sektor, serta masyarakat telah berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3) Application (Aplikasi)

Aplikasi atau penerapan dalam implementasi program ODF di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai keberhasilan karena yang sebelumnya terdapat sedikit kegagalan dalam sistem pemicuan kepada masyarakat, selanjutnya dapat diatasi dengan adanya bantuan pembangunan jamban secara langsung kepada masyarakat dengan penggunaan anggaran yang diperoleh sebagian besar dari lintas sektor yaitu perusahaan-perusahaan swasta, organisasi, dan perorangan.

4) Faktor pendukung dan penghambat implementasi program ODF di Kabupaten Sidoarjo

Faktor pendukungnya adalah adanya dorongan dari surat edaran Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo terkait percepatan *Open Defection Free* dan peraturan presiden terkait percepatan penurunan stunting, percepatan Kabupaten Sidoarjo Deklarasi ODF, dan dukungan berbagai pihak yang terlibat seperti OPD dan lintas sektor yang senantiasa berkomitmen untuk bekerja sama. Lalu untuk faktor penghambatnya adalah kebiasaan buruk masyarakat menormalisasikan perilaku BAB sembarangan di sungai, kurangnya kesadaran diri untuk membangun jamban secara mandiri, dan kurangnya peran anggaran APBD untuk alokasi anggaran pembangunan jamban pada tahun 2024.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, F. (2023). *Angka Stunting Tahun 2022 Turun Menjadi 21,6 Persen*. BKKP Kemenkes RI. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/angka-stunting-tahun-2022-turun-menjadi-216-persen/#:~:text=Dalam kesempatan yang sama saat,%2C6%25 di tahun 2022>
- Aprianto, D. N. (2023). *Kasus Stunting di Sidoarjo Turun 2,4 persen*. Jawa Pos.



<https://www.jawapos.com/surabaya-raja/013263259/kasus-stunting-di-sidoarjo-turun-24-persen>

- Bakorwil. (2023). *Angka Prevalensi Stunting Jawa Timur Tahun 2022 dibawah Standar WHO*. Bakorwil Bojonegoro. <https://bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id/angka-prevalensi-stunting-jawa-timur-tahun-2022-di-bawah-standar-who#:~:text=Ketua Tim Penggerak PKK Jawa,di angka 19%2C2%25>
- Balitbangkes Kemenkes RI. (2014). *Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM) 2013*. In *Kemenkes RI*.
- Maryani, F. R., & Mandagi, A. M. (2023). Hubungan Sanitasi Lingkungan Dan Kualitas Air Dengan Kejadian Stunting: Systematic Review. *Prepotif ...*, 7(April). <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/12474%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/download/12474/10756>
- Massie, R. (2009). Kebijakan Kesehatan: Proses, Implementasi, Analisis Dan Penelitian. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 12(4), 409–417.
- Mawaza, J. F., & Khalil, A. (2020). Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.386>
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>
- Rahmuniyati, M. E., & Sahayati, S. (2021). Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Untuk Mengurangi Kasus Stunting Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Sleman. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 80–95. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v5i1.1235>
- Rifai, A. (2023). *Sidoarjo Targetkan Bebas ODF 100 Persen*. Antara News. <https://jatim.antaranews.com/berita/704007/sidoarjo-targetkan-bebas-odf-100-persen>